



Kriteria Pemilihan Lembaga Wakaf di Indonesia: Pendekatan *Multicriteria Decision Making*

Aam Slamet Rusydiana

Sharia Economic Applied Research & Training (SMART), Indonesia

aamsmart@gmail.com

Abstrak

Keuangan Islam juga dikenal sebagai entitas keuangan sosial yang juga memiliki peran yang sama pentingnya bagi kepentingan publik. Salah satu instrumen keuangan sosial Islam adalah wakaf. Biasanya, wakaf atau wakaf dikelola oleh lembaga yang dikenal sebagai nadzir atau manajemen wakaf. Penelitian ini mencoba menganalisis preferensi dan perilaku kriteria untuk pemilihan lembaga wakaf atau wazir nazhir di Indonesia melalui metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikenal sebagai pendekatan Analytical Network Process (ANP). Hasilnya menyimpulkan bahwa kriteria yang paling prioritas yang mempengaruhi pemilihan lembaga wakaf di Indonesia adalah transparansi / akuntabilitas keuangan dan program inovatif. Oleh karena itu, manajer wakaf atau nazhir harus selalu dapat dipercaya dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola dana dan dana abadi. Selain itu, manajer profesional dan inovatif diperlukan dalam mengelola objek wakaf.

Kata Kunci: *Preferensi, Perilaku, Lembaga Wakaf, ANP, MCDM*

Abstract

Islamic finance is also known as a social financial entity that also has an equally important role for public benefit. One of Islamic social financial instrument is waqf. Typically, waqf or endowments are managed by an institution known as nadzir or the management of waqf. This study tries to



analyze the preferences and behavior of criteria for selection of waqf institution or nazhir waqf in Indonesia through the multicriteria decision making method known as Analytical Network Process (ANP) approach. The results conclude that the most priority criteria that influence the selection of waqf institution in Indonesia are financial transparency/accountability and innovative program. Therefore, waqf managers or nazhir must always be trustworthy and fully responsible for managing funds and endowments. In addition, professional and innovative managers are needed in managing waqf objects.

Keywords: *Preference, Behaviour, Waqf Institution, ANP, MCDM*

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah, menjadi objek studi yang selalu menarik diteliti. Terutama jika dikomparasi dengan kondisi industri keuangan konvensional yang telah lebih dahulu eksis. Misalnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfalalah et al (2018) yang menyatakan bahwa perbankan syariah relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi *shock* baik dari internal maupun eksternal. Hal ini menjadi temuan menarik yang perlu dibuktikan melalui berbagai riset di masa mendatang.

Selain industri keuangan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan sebagainya, dalam keuangan Islam dikenal pula entitas keuangan sosial yang juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Industri *Islamic social finance* tersebut antara lain adalah lembaga zakat, lembaga wakaf, baitul maal wat tamwiil dan sebagainya. Penelitian ini akan mencoba mengelaborasi terkait preferensi publik terhadap kriteria lembaga wakaf yang ideal.

Wakaf adalah instrumen sosial dalam Islam yang bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia. Hakikatnya, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu jangka panjang serta bernilai ekonomi. Harta benda wakaf ini terbagi menjadi dua yaitu harta benda tidak bergerak dan benda bergerak. Lazimnya, harta benda wakaf dikelola oleh sebuah lembaga yang dikenal dengan sebutan nadzir atau pengelola wakaf. Di Indonesia, lembaga yang secara khusus mengelola wakaf termasuk juga dana wakaf uang dan berskala nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain lembaga milik pemerintah, lembaga wakaf juga bisa datang dari swasta, organisasi dan masyarakat, tentunya dengan seizin pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Beberapa yang dikenal diantaranya adalah Global Wakaf, Dompot Dhuafa, Rumah Wakaf dan yang lainnya.

Dalam perkembangannya kemudian, konsep wakaf berkembang hingga muncul wakaf barang bergerak berupa wakaf uang dengan potensinya yang cukup besar (Rusydia & Devi, 2017). Wakaf uang bahkan bisa dikelola oleh Bank Syariah (Lembaga Keuangan Syariah) maupun lembaga swasta. Untuk mendukung penghimpunan wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Agama RI dan Bank Indonesia memberikan izin kepada bank-bank syariah di Indonesia untuk dapat menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) sebagai lembaga yang sah untuk menerima wakaf uang. Menurut data dari BWI, saat ini ada 15 lembaga keuangan syariah dan 102 nadzir wakaf yang sudah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai penerima wakaf uang.

Penelitian ini akan mencoba memotret persepsi publik dan preferensinya terhadap kriteria lembaga wakaf yang diharapkan. Studi sebelumnya tentang preferensi masyarakat terhadap lembaga wakaf tidak banyak ditemukan. Riset-riset terkait wakaf cenderung bersifat kualitatif (Rusydia & Alparisi, 2016). Namun demikian, riset-riset yang berbicara terkait kriteria yang perlu dimiliki oleh sebuah lembaga wakaf agar berhasil dalam prosesnya, telah dilakukan beberapa peneliti. Misalnya, riset yang dilakukan oleh Ramli et al (2018), Hassan et al (2018), Hasan & Siraj (2017), Saad et al (2016), hingga Masruki & Shafii (2013) dengan objek riset di Malaysia. Demikian juga kasus lembaga wakaf di beberapa negara Islam lainnya seperti Bangladesh, Saudi Arabia, Nigeria, Turki hingga Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk memilih lembaga wakaf. Apakah faktor-faktor tersebut timbul dari masing-masing individu berupa tingkat religiusitas atau karena sifat dari internal lembaga atau yang berasal dari institusinya. Faktor tersebut misal karena pengelola wakaf yang profesional, transparansi dan akuntabilitas nadzir wakaf, pelayanan yang baik yang diberikan lembaga wakaf, atau karena adanya promosi melalui aneka media. Diantara beberapa faktor ini akan dicari kriteria terpenting menurut responden terkait pemilihan lembaga wakaf.

Penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Pertama mencoba menganalisis preferensi dan perilaku pemilihan kriteria lembaga wakaf di Indonesia. Kedua, dari penentuan prioritas kriteria tersebut, lembaga wakaf mana kemudian yang lebih memiliki preferensi tinggi dimata masyarakat. Jika kebanyakan studi terkait yang telah dilakukan lebih banyak menggunakan analisis faktor atau statistik deskriptif biasa, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan Analytical Network Process (ANP) yang dikembangkan oleh Saaty (Rusydia, 2016).

KAJIAN LITERATUR

Secara umum, faktor yang mempengaruhi pemilihan lembaga wakaf oleh masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang muncul dalam banyak literatur adalah pengaruh sosiologis. Secara psikologis, orang cenderung bereaksi terhadap rekomendasi teman, kerabat dan anggota keluarga, maka kekuatan implisit dari iklan dari mulut ke mulut. Demikian juga faktor relijiositas dan *awareness* masyarakat.

Selain pengaruh sosial, preferensi publik terhadap lembaga wakaf dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus yang bersifat internal untuk masing-masing lembaga wakaf. Kenyamanan merupakan faktor potensial, demikian juga kualitas pelayanan. Kenyamanan diukur dengan lokasi lembaga dalam kaitannya dengan rumah dan kantor, kemudahan berdonasi dan lain sebagainya. Demikian juga fasilitas kecanggihan teknologi yang dimiliki lembaga sosial semisal lembaga wakaf.

Beberapa penelitian terkait preferensi terhadap lembaga wakaf telah dilakukan di beberapa negara meskipun relatif sedikit jika dibandingkan dengan riset serupa tentang preferensi terhadap bank syariah. Di Malaysia, penelitian tentang kriteria yang penting yang harus dimiliki lembaga wakaf dilakukan oleh Ramli et al (2018), Hassan et al (2018), Baqutayan et al (2018), Hasan & Siraj (2017), Saad et al (2016), hingga Masruki & Shafii (2013).

Beberapa kriteria penting yang perlu dimiliki sebuah lembaga wakaf untuk kasus riset di Malaysia adalah: faktor strategic leadership, pemahaman terkait fundamental wakaf, ghirah dari para pengelola, struktur manajemen yang spesifik, profesionalisme, 'self satisfaction', tata kelola yang baik, faktor akuntabilitas, dan program yang inovatif. Penelitian terkait kriteria penting yang perlu dimiliki sebuah lembaga wakaf di tempat lain telah dilakukan di Nigeria (Musa & Salleh, 2018), Bangladesh (Hasan et al, 2017), Saudi Arabia (Saad et al, 2016), serta Turki dan UK (Razak et al, 2016). Faktor-faktor preferensi terhadap lembaga wakaf relatif tidak jauh berbeda dengan kriteria seperti di atas dengan penekanan pada faktor akuntabilitas dan tata kelola lembaga yang baik.

Di Indonesia, tidak banyak penelitian tentang preferensi dan kriteria pemilihan masyarakat secara umum terhadap lembaga wakaf. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan et al (2017) adalah pengecualian. Meskipun riset ini pun tidak sepenuhnya persis tentang preferensi lembaga wakaf namun lebih melihat praktik akuntabilitas pada lembaga wakaf Dompot Dhuafa. Penelitiannya membuktikan bahwa akuntabilitas holistik yang

dipraktekkan oleh Dompot Dhuafa adalah proses integratif. Hal ini tidak hanya mencakup akuntabilitas ke atas dan ke bawah, tetapi juga melibatkan komitmen untuk melestarikan nilai-nilai organisasi. Selain itu, penelitian Razak et al (2016) mengelaborasi isu wakaf tunai dimana lembaga wakaf perlu memiliki program-program yang inovatif.

Dari penggunaan metode penelitian yang digunakan, sebagian besar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif biasa. Beberapa metode berbeda dalam riset preferensi terhadap lembaga wakaf adalah: model NVivo (Ramli et al, 2018), structural equation model (Mussa & Salleh, 2018), dan partial least square (PLS) SEM (Hasan et al, 2017). Penelitian ini sendiri akan menggunakan metode relatif baru dan belum pernah digunakan dalam analisis kriteria pemilihan lembaga wakaf yakni metode Analytical Network Process (ANP) yang dikembangkan oleh Saaty (Rusydiana dan Devi, 2013).

Tabel 1

Studi Literatur Kriteria Lembaga Wakaf di Beberapa Negara

NO	SOURCE/OBJECT	METHODS	WAQF INSTITUTION CRITERIA
1	Ramli et al (2018)/Malaysia	Nvivo Qualitative	Strategic leadership, Knowledge of Waqf fundamental, jihad attitude
2	Hassan et al (2018)/ Malaysia	Descriptive	Specific management structure, professionalism
3	Musa & Salleh (2018)/Nigeria	SEM	Innovative program, Awareness
4	Baqutayan et al (2018)/ Malaysia	Qualitative	Self satisfaction
5	Ihsan et al (2017)/Indonesia	Qualitative	Accountability
6	Hasan et al (2017)/Bangladesh	SEM PLS	High trust and commitment
7	Hasan & Siraj (2017)/Malaysia	Qualitative	Good governance, accountability
8	Saad et al (2016)/Malaysia & KSA	Descriptive stats	Innovative program
9	Razak et al (2016)/Selected OIC: Turkey, UK, Malaysia & Indonesia	Content analysis	Innovative program
10	Masruki & Shafii (2013)/Malaysia	Qualitative	Accountability, Governance

Analytic Network Process

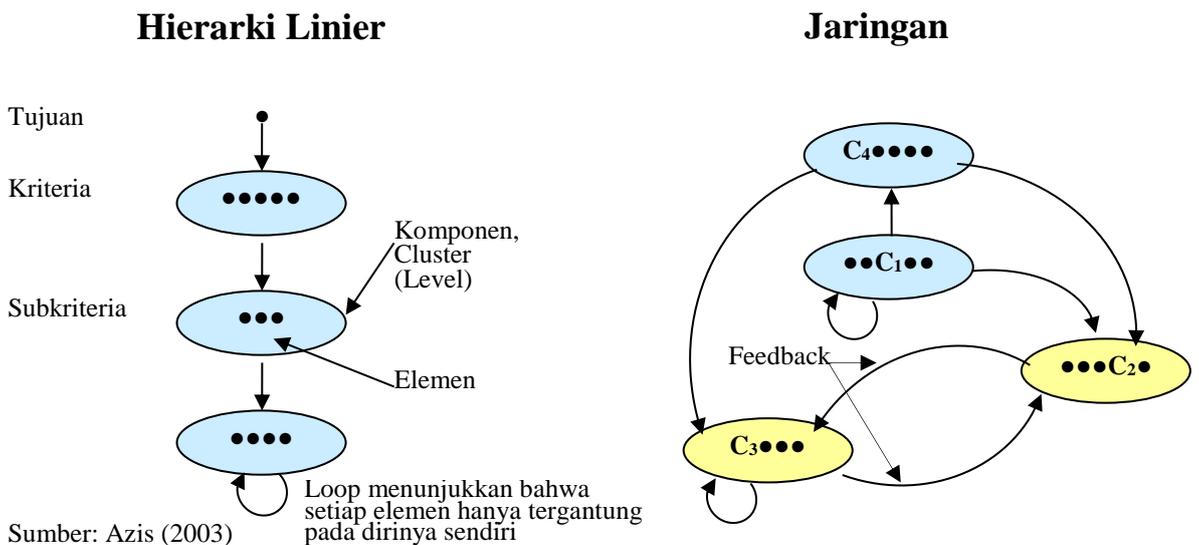
Analytic Network Process atau ANP adalah teori umum pengukuran relatif yang digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol

(Saaty, 2003). ANP merupakan teori matematika yang memungkinkan seseorang untuk memperlakukan *dependence* dan *feedback* secara sistematis yang dapat menangkap dan mengkombinasi faktor-faktor *tangible* dan *intangible* (Azis, 2003). ANP merupakan pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level.

ANP merupakan pengembangan dari Analytic Hierarchy Process (AHP) dimana level-level memiliki hierarki. Pada jaringan AHP terdapat level tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif, dimana masing-masing level memiliki elemen. Sementara itu, pada jaringan ANP, level dalam AHP disebut cluster yang dapat memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya, yang sekarang disebut simpul (baca gambar 2.1).

Gambar 2

Perbandingan Hierarki dan Jaringan



Prinsip-prinsip dasar ANP ada tiga, yaitu dekomposisi, penilaian komparasi (*comparative judgements*), dan komposisi atau sistesis dari prioritas (Saaty, 1996). **Prinsip dekomposisi** diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hierarki atau jaringan cluster, sub-cluster, sus-sub cluster, dan seterusnya. Dengan kata lain dekomposisi adalah memodelkan masalah ke dalam kerangka ANP.

Prinsip penilaian komparasi diterapkan untuk membangun perbandingan pasangan (*pairwise comparison*) dari semua kombinasi elemen-elemen dalam cluster dilihat dari cluster induknya. Perbandingan pasangan ini digunakan untuk mendapatkan prioritas lokal dari elemen-

elemen dalam suatu cluster dilihat dari cluster induknya. **Prinsip komposisi hierarkis atau sintesis** diterapkan untuk mengalikan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam cluster dengan prioritas 'global' dari elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hierarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah (biasanya merupakan alternatif).

Dalam perkembangannya, metode yang pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty ini mengalami beberapa 'ekstensi' dan pengembangan analisis. Berikut ini adalah beberapa analisis yang berawal dari Analytic Hierarchy Process sejak tahun 1977.

Tabel 1
Perkembangan analisis AHP/ANP

NO	SUMBER	TAHUN	PENULIS
1	A scaling method for priorities in hierarchical structures	1977	Saaty
2	Reciprocal matrices with random coefficients	1984	Vargas
3	A note on the analysis of subjective judgement matrices	1985	Crawford&Williams
4	Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process	1986	Saaty
5	The theory of ratio scale estimation - Saaty AHP	1987	Harker & Vargas
6	Uncertainty and rank order in the analytic hierarchy process	1987	Saaty & Vargas
7	How to make a decision - The analytic hierarchy process	1990	Saaty
8	Remarks on the analytic hierarchy process	1990	Dyer
9	An exposition of the AHP in reply to the paper remarks on AHP	1990	Saaty
10	Highlights and critical points in the theory & application of AHP	1994	Saaty
11	Using AHP for resource allocation problems	1995	Ramanathan&Ganesh
12	Aggregating individual judgements and priorities with the AHP	1998	Forman & Peniwati
13	A decision support system for supplier selection using AHP&LP	1998	Ghodsypur&Obrien
14	Decision making with dependence & feedback: The ANP	2001	Saaty
15	The encyclicon: A dictionary of decisions with dependence and feedback based on the analytic network process	2004	Saaty & Ozdemir
16	A study on the utilization of compatibility metric in the AHP	2005	Yoon & Jung

17	An approach to avoiding rank reversal in AHP	2006	Wang & Elhag
18	A new MADM method: Hierarchical fuzzy axiomatic design	2009	Kahraman & Cebi
19	Financial service sector performance measurement model: AHP sensitivity analysis and BSC approach	2011	Wu, Lin & Tsai
20	The neural network process (NNP): Generalization of the AHP and ANP to the continuous case of neural firing	2015	Saaty

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode ANP. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya, fungsi utama AHP/ANP ada tiga yaitu menstruktur kompleksitas, pengukuran, dan sintesis. Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah metode ANP sehingga mendapatkan hasil akhir berupa nilai bobot eigenvalue.

Prosedur untuk Mendapatkan Skala Rasio

Misalkan $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ adalah n elemen suatu matriks didalam suatu hierarki. Perbandingan pasangan dari elemen-elemen (A_i, A_j) yang harus kita lakukan dicerminkan oleh $A = (a_{ij})$, matriks $n \times n$, dimana $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$. Definisikan suatu set bobot numerik $w_1, w_2, w_3, \dots, w_n$ yang mencerminkan perbandingan yang diperoleh, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$A = \begin{matrix} & A_1 & A_2 & & A_n \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ A_n \end{matrix} & \begin{bmatrix} w_1 / w_1 & w_1 / w_2 & \dots & \dots & w_1 / w_n \\ w_2 / w_1 & w_2 / w_2 & \dots & \dots & w_2 / w_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_n / w_1 & \dots & \dots & \dots & w_n / w_n \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Karena setiap baris merupakan perkalian tetap dari baris pertama, maka A memiliki *unit* rank. Dengan mengalikan A dan vektor bobot w ,

$$Aw = nw \tag{3.1}$$

Untuk mendapatkan skala dari rasio-rasio matriks, sistem di bawah ini harus dipecahkan:

$$(A-nI)w = 0 \tag{3.2}$$

Dari sini jelas bahwa solusi nontrivial dapat diperoleh jika dan hanya jika $\det(A-nI)$ lenyap, yaitu persamaan karakteristik A . Sehingga, n adalah

eigenvalue dan w adalah *eigenvector* dari A . Apabila A memiliki *unit rank*, semua *eigenvalue*-nya adalah nol, kecuali satu. Jadi, *trace* dari A adalah sama dengan n .

Jika setiap *entry* 'komponen' di A dinyatakan dengan a_{ij} , maka $a_{ij} = 1/a_{ji}$ (*reciprocal property*) terpenuhi, dan juga $a_{jk} = a_{ik}/a_{ij}$ (*consistency property*). Secara definisi, $a_{ii} = a_{jj} = 1$ (ketika membandingkan dua elemen yang sama). Sehingga, jika kita akan meranking sejumlah n elemen, sebagai contoh, A memiliki ukuran $n \times n$, jumlah input yang diperlukan (dari perbandingan pasangan) adalah kurang dari n^2 ; yaitu hanya sama dengan jumlah komponen dari sub-diagonal bagian dari A (baca Saaty, 1994). Jadi, jika ada tiga elemen dalam suatu level tertentu dari suatu hierarki, maka hanya tiga perbandingan pasangan yang diperlukan.

Namun demikian, secara umum nilai yang tepat dari w_i/w_j sulit diketahui karena perbandingan pasangan yang kita buat hanyalah suatu perkiraan, yang berarti bahwa masih terdapat gangguan. Meskipun *reciprocal property* tetap berlaku, *consistency property* tidak lagi berlaku. Dengan mengambil *eigenvalue* terbesar yang dinyatakan dengan λ_{\max} ,

$$A^P w^P = \lambda_{\max} \cdot w^P \quad (3.3)$$

Dimana A^P adalah matriks aktual atau yang diketahui (matrik A dengan gangguan). Meskipun persamaan (3.1) dan (3.3) tidak identik, jika w^P diperoleh dari memecahkan persamaan (3.3), matriks yang komponennya adalah w_i/w_j masih merupakan matriks yang konsisten; matriks ini merupakan estimasi matriks A yang konsisten, meskipun A^P sendiri tidak harus konsisten. Perhatikan bahwa A^P akan konsisten jika dan hanya jika $\lambda_{\max} = n$. Sepanjang nilai yang tepat dari w_i/w_j tidak bisa diperoleh, yang merupakan hal yang lumrah dalam kasus nyata disebabkan adanya bias dalam perbandingan, λ_{\max} akan selalu lebih besar dari atau sama dengan n (jadi, pengukur konsistensi dapat diperoleh berdasarkan pada deviasi λ_{\max} dari n).

Ketika lebih dari dua elemen dibandingkan, masalah konsistensi dapat dihubungkan dengan kondisi transitivitas: jika $A_1 \succ A_2$ dan $A_2 \succ A_3$, maka $A_1 \succ A_3$. Jelaslah sudah bahwa dalam memecahkan w , asumsi transitivitas tidak mesti diperlukan; perbandingan yang dimasukkan tidak harus mencerminkan konsistensi penuh. Namun demikian, seperti telah diperlihatkan sebelumnya, matriks yang dihasilkan dan vektornya masih tetap konsisten. Vektor w yang konsisten inilah yang mencerminkan ranking prioritas dari elemen-elemen dalam setiap level. Jadi, dalam hierarki standar dengan tiga level (tujuan, kriteria, dan alternatif kebijakan), elemen-elemen pada setiap level dibandingkan sepasang-sepasang dengan memperhatikan elemen-elemen dalam level di atasnya, dan vektor yang

dihasilkan untuk level dasar mencerminkan ranking dari alternatif kebijakan.

Langkah-langkah Penelitian

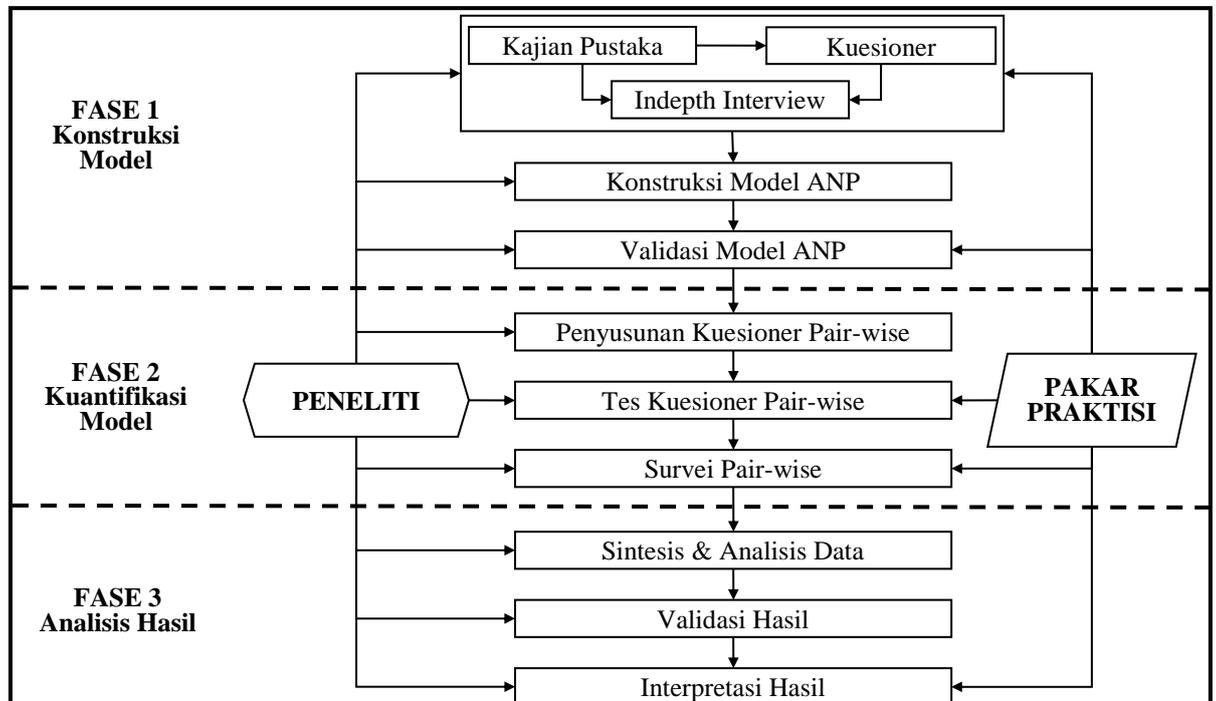
ANP memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan pendekatan lainnya, seperti:

1. Pendekatan ini memungkinkan analisis secara *holistic* dan tidak parsial, dimana seluruh faktor dan kriteria dipertimbangkan dalam kerangka model baik secara hierarki maupun keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lain maupun antar criteria satu dengan yang lain. (Saaty, 2006)
2. Pendekatan ini mensyaratkan adanya pemahaman yang dalam dan pengalaman terhadap subyek yang akan diteliti, dan tidak bergantung pada kemampuan berargumentasi secara logis. Feeling dan intuisi memegang peranan yang sangat penting untuk mengambil suatu keputusan atau untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu permasalahan. (Saaty, 2006)
3. Biaya Responden yang lebih rendah, karena indepth interview dilakukan secara langsung kepada pakar yang memahami permasalahan dengan baik dan dalam.
4. Pelaksanaan survey yang tidak membutuhkan waktu yang panjang.

Oleh karena itu, responden yang akan dilibatkan dalam studi ini mencakup masyarakat yang masuk dalam kategori wakif. Total jumlah responden dalam penelitian ini menggunakan prinsip sampling dengan metode tertentu.

Penelitian dengan metode ANP mencakup tiga fase utama, yaitu konstruksi model, kuantifikasi model dan analisis hasil. Langkah-langkah penelitian secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2

Gambar 3
Langkah-langkah Penelitian ANP



Sumber: Ascarya (2005)

Fase 1 adalah konstruksi model atau dekomposisi untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menstruktur kompleksitas masalah ke dalam jaringan ANP yang tepat, yang meliputi: a) kajian pustaka, kuesioner dan indepth interview dengan pakar dan praktisi pemasaran dan *behaviour* untuk memahami masalah; b) membangun jaringan ANP berdasarkan pemahaman di atas; c) validasi jaringan ANP yang dirancang kepada pakar dan praktisi.

Fase 2 adalah kuantifikasi model dengan menggunakan perbandingan berpasangan (*pair-wise comparison*), yang meliputi: a) merancang kuesioner *pair-wise* yang bersesuaian dengan jaringan ANP yang dirancang pada fase 1; b) menguji kuesioner *pair-wise* ke calon responden pakar dan praktisi; dan c) survey ke responden pakar dan praktisi untuk membimbing mereka mengisi kuesioner *pair-wise* dengan benar dan terjaga konsistensinya.

Fase 3 adalah sintesis dan analisis hasil, yang meliputi: a) memroses data yang diperoleh pada fase 2 dengan software ANP (*superdecisions*), melakukan sintesis dan mendapatkan hasilnya, serta menghitung

geometric mean dan rater agreement¹; b) validasi hasil yang diperoleh; dan c) menginterpretasi hasil, menganalisis hasil, serta memberikan rekomendasi kebijakan.

Pada praktiknya, penggunaan metode ANP dalam riset sangat bervariasi pada berbagai bidang, seperti yang disampaikan oleh Sipahi & Timor (2010), Lee (2010) dan Ho (2008). Sementara itu, dalam ekonomi keuangan syariah, penelitian dengan metode ANP telah dilakukan oleh Rusydiana (2016), Rusydiana dan Devi (2013), Ascarya (2015), Rusydiana dan Devi (2018), dan penelitian yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Tabel di bawah ini menunjukkan dari total responden yang diwawancarai, 72 responden adalah laki-laki (60%) dan 48 responden adalah perempuan (40%). Distribusi status pernikahan relatif seimbang yakni 64 responden (53%) telah menikah dan 56 responden (47%) belum menikah. Responden dengan kelompok usia di bawah 30 tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu 79 orang (66%) sementara responden kelompok usia di atas 30 tahun berjumlah 41 orang (34%). Dalam perspektif sektor pekerjaan, hanya 16 responden yang berlatar belakang PNS/ sektor publik (13%) sementara 104 responden (87%) berlatar belakang swasta.

Tabel 2
Demografi Responden

NO	VARIABEL	LEVEL	FREKUENSI	(%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	72	60%
		Perempuan	48	40%
2	Usia	< 30	79	66%
		> 30	41	34%
3	Pendidikan	Pascasarjana	24	20%
		Sarjana	72	60%
		Diploma & dibawahnya	24	20%
4	Status Pernikahan	Menikah	64	53%

¹ Untuk mengetahui cara penghitungan geometric mean dan rater agreement atau Kendall's coefficient dapat merujuk pada paper Ascarya (2011),

		<i>Single</i>	56	47%
5	Sektor Pekerjaan	PNS	16	13%
		Swasta	104	87%
6	<i>Background</i> Ekonomi Islam	Ya	78	65%
		Tidak	42	35%

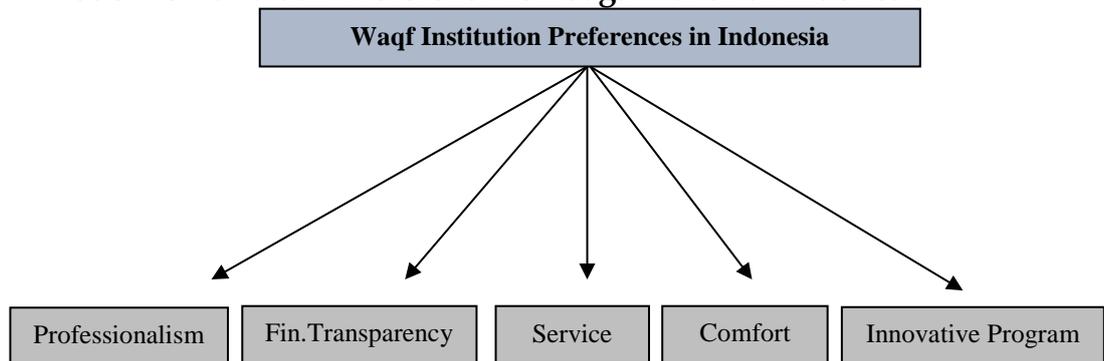
Terkait pendidikan, 24 orang dari keseluruhan responden (20%) telah mencapai pascasarjana, 72 responden (60%) bergelar sarjana dan sisanya 24 responden (20%) memiliki pendidikan diploma atau di bawahnya. Adapun terkait latar belakang pendidikan ekonomi Islam, mayoritas responden memiliki *background* pendidikan ekonomi Islam yaitu 78 responden (65%), meskipun ada pula responden yang tidak memiliki latar belakang ekonomi Islam sebanyak 42 responden (35%).

Analisis Model

Pada tahap ini peneliti melakukan kajian-kajian secara pustaka terhadap seluruh aspek yang menjadi preferensi masyarakat terhadap lembaga wakaf di Indonesia. Selain itu dilakukan juga *indepth interview* kepada beberapa responden yang dianggap paling mengetahui terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Serta pencarian prioritas dilakukan pula melalui pengisian kuesioner sehingga dengan ketiga cara ini maka penulis dapat menemukan aspek-aspek yang akan menjadi prioritas pemilihan lembaga wakaf di Indonesia. Selanjutnya dibuat sebuah model untuk kemudian dianalisis menggunakan software.

Gambar 4

Model Perilaku dan Preferensi Lembaga Wakaf di Indonesia

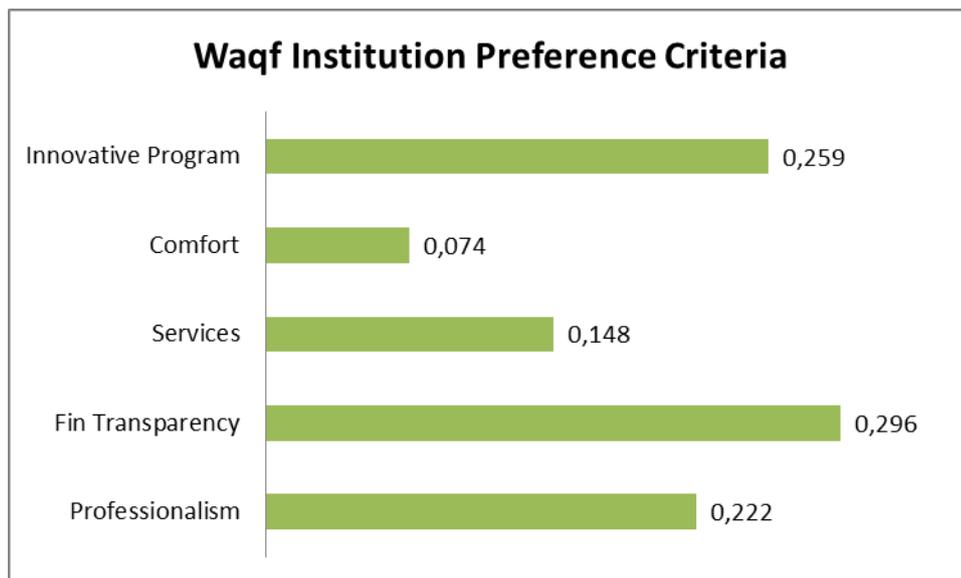


Setelah penentuan kriteria dan pembuatan model selesai selanjutnya, dilakukan penyebaran kuesioner terhadap seluruh responden untuk ditemukan bobot kriteria yang akan menjadi prioritas pemilihan lembaga wakaf di Indonesia. Adapun pengolahan data kuesioner dilakukan dengan menggunakan *software SuperDecision*.

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar menunjukkan nilai *geometric mean* dari prioritas agregat atas total 120 responden berdasarkan prinsip perbandingan berpasangan, baik untuk kriteria lembaga wakaf maupun alternatif lembaga wakaf. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode ANP, nilai rasio indeks inkonsistensi adalah sebesar 0.04. Nilai ini menunjukkan hasil yang konsisten dan valid dimana nilai maksimal *inconsistency index* adalah 10% atau 0.1.

Gambar 5

Nilai Bobot Kriteria Pemilihan Lembaga Wakaf



Berdasarkan nilai bobot *eigenvalue* yang dihasilkan dari supermatriks, kriteria paling prioritas yang mempengaruhi pemilihan lembaga wakaf adalah faktor transparansi keuangan/akuntabilitas (0.296) diikuti oleh faktor inovasi program yang dimiliki lembaga wakaf (0.259). Berturut-turut kriteria selanjutnya adalah faktor profesionalisme lembaga wakaf (0.222), faktor pelayanan yang diberikan (0.148) dan terakhir faktor kenyamanan (0.074).

Relevan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Ihsan et al (2017), Hasan & Siraj (2017) dan Masruki & Shafii (2013), penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria penting yang mempengaruhi pemilihan lembaga wakaf di Indonesia adalah faktor transparansi keuangan (akuntabilitas). Pada faktanya, faktor *accountability* ini menjadi kriteria

paling penting dibanding kriteria yang lain menurut para responden. Hal ini berimplikasi bahwa lembaga wakaf harus senantiasa amanah dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola dana dan objek wakaf. Pada sisi ini, konsep mengenai akuntabilitas, transparansi dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban lembaga wakaf dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para wakif dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh publik.

Adapun kriteria kedua yang dianggap paling penting dalam pemilihan lembaga wakaf adalah faktor program yang inovatif. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Musa & Salleh (2018), Saad et al (2016) dan Razak et al (2016) yang menyatakan bahwa faktor 'innovative program' lembaga wakaf adalah kriteria penting sebuah lembaga wakaf, terutama kaitannya dengan wakaf tunai dan wakaf produktif. Hal ini memberikan dampak terhadap keputusan lembaga wakaf dalam penentuan strategi marketingnya dengan misalnya melakukan inovasi baik dari sisi fundraising pengumpulan dana wakaf, pengelolaan dan penyaluran investasi hasil dana wakaf uang.

Yang juga tidak kalah penting adalah bahwa faktor profesionalisme lembaga filantropi semisal lembaga wakaf menjadi bahan pertimbangan responden dalam memilih lembaga wakaf. Hasil ini diamini oleh Hassan et al (2018) yang mengatakan bahwa faktor profesionalisme nazhir pengelola menjadi faktor penting dalam keberhasilan lembaga. Dari sisi kompetensi, nazhir wakaf dituntut untuk profesional, amanah dan memahami fikih serta manajemen wakaf.

SIMPULAN

Diantara beberapa riset yang ada, masih sangat jarang bahkan bisa disebut belum pernah ada yang mengaplikasikan pendekatan *multicriteria decision making* berupa metode Analytic Network Process dalam riset tentang kriteria penting pemilihan lembaga wakaf. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan itu. Beberapa hasil penelitian di negara dengan keberadaan lembaga wakaf dan filantropi lain, menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Namun diantara faktor yang mempengaruhi pemilihan lembaga wakaf oleh publik dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil perhitungan, kriteria paling prioritas yang mempengaruhi pemilihan lembaga wakaf di Indonesia adalah faktor transparansi keuangan (0.296) diikuti oleh faktor inovasi program yang dimiliki lembaga wakaf (0.259). Berturut-turut kriteria selanjutnya adalah

faktor profesionalisme lembaga wakaf (0.222), faktor pelayanan (0.148) dan faktor kenyamanan (0.074).

Dari hasil ini, para nazhir pengelola wakaf harus senantiasa amanah dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola dana dan objek wakaf. Selain itu, nadzir wakaf perlu melakukan inovasi baik dari sisi fundraising pengumpulan dana/objek wakaf, pengelolaan serta penyaluran investasi hasil dana wakaf uang. Yang juga tak kalah penting adalah dari sisi kompetensi, nazhir wakaf dituntut untuk profesional, amanah dan memahami fikih serta manajemen wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, (2005), "Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif". Makalah disampaikan pada Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta
- Ascarya (2015), "Determining the real causes of financial crisis in Islamic economic perspective: ANP approach", *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol.9, No.2, pp.109-127.
- Azis, Iwan J. (2003), "Analytic network process with feedback influence: A new approach to impact study", Paper presented in seminar organized by the Departement of Urban and Regional Planning, University of Illinois, Urbana-Campaign.
- Baqutayan, S.M.S., Mohsin, M.I.A., Mahdzir, A.M., and Ariffin, A.S. (2018), "The psychology of giving behavior in Islam", *Sociology International Journal*, Vol.2, Issue 2, pp.88-92.
- Crawford, G. and C. Williams. (1985), "A note on the analysis of subjective judgement matrices", *Journal of Mathematical Psychology* Vol 29, pp.387-405.
- Dyer, J.S. (1990), "Remarks on the analytic hierarchy process", *Management Science* Vol 36, pp.249.
- Forman, E., and K. Peniwati. (1998), "Aggregating individual judgements and priorities with the analytic hierarchy process", *European Journal of Operational Research* Vol 108, pp.165-169
- Ghodsypour, S.H., and C. O'Brien. (1998), "A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming", *International Journal of Production Economics* 56-57, pp.199-212.
- Harker, P.T. and Vargas, L.G. (1987), "The theory of ratio scale estimation: Saaty's analytic hierarchy process", *Management Science* Vol 33, pp.1383-1403.
- Hasan, R., and Siraj, S.A. (2017), "Toward developing a model of stakeholder trust in waqf institutions", *Islamic Economic Studies*, Vol.25, Special issue, pp.85-109.

- Hasan, R., Siraj, S.A., and Mohamad, M.H.S. (2017), "Antecedents and outcome of waqif's trust in waqf institution", *Journal of Economic Cooperation and Development*, Vol.38, No.4, pp.155-180.
- Hassan, N., Abdul-Rahman, A., and Yazid, Z. (2018), "Developing a new framework of waqf management", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol.8, No.2, pp.287-305.
- Ho, W. (2008), "Integrated analytic hierarchy process and its applications: A literature review", *European Journal of Operational Research*, Vol. 186, pp. 211-228.
- Ihsan, H., Sulaiman, M., Alwi, N.M., and Adnan, M.A. (2017), "A study of accountability practice in Dompot Dhuafa waqf of Indonesia", *JKAU: Islamic Economics*, Vol.30, No.2, pp.13-32.
- Islamic Banker Association. (2017). *Global Islamic Finance Report 2017*.
- Kahraman, C., and S. Cebi. (2009), "A new multi-attribute decision making method: Hierarchical fuzzy axiomatic design", *Expert Systems with Applications* Vol 36, pp.4848-4861.
- Lee, M.C. (2010), "The analytic hierarchy and the network process in multicriteria decision making: Performance evaluation and selecting key performance indicators based on ANP model", *Convergence and Hybrid Information Technologies*, Book edited by Marius Crisan.
- Masruki, R., and Shafii, Z. (2013), "The development of waqf accounting in enhancing accountability", *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol.13, pp.1-6
- Musa, S.O., and Salleh, M.C.M. (2018), "Proposing a model for entrepreneurship development: The role of entrepreneurs' cash waqf intention", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol.4, No.1, pp.183-204.
- Nurfalah, I., Rusydiana, A.S., Laila, N., and Cahyono, E.F. (2018), "Early warning to banking crises in the dual financial system in Indonesia: The markov switching approach", *JKAU: Islamic Economics*, Vol.31, No.2, pp.133-156.

- Ozdemir, Asli. (2013). "Integrating analytic network process and data envelopment analysis for efficiency measurement of Turkish commercial banks". *Banks and Bank Systems Volume 8 issue 2*.
- Ramanathan, R., and L.S. Ganesh. (1995), "Using AHP for resource allocation problems", *European Journal of Operational Research* Vol 80, pp.410-417.
- Ramli, A., Fahmi, F., Darus, F., and Ismail, N. (2018), "Primary drivers of sustainable performance: The case of corporate waqf", *GJAT January 2018 Special Issue*, pp.207-218.
- Razak, D.A., Embi, N.A.C., Salleh, M.C.M., and Fakhrunnas, F. (2016), "A study on sources of waqf funds for higher education in selected countries", *Adam Akademi*, Vol.6, No.1, pp.113-128.
- Rusydiana, Aam Slamet (2016). "Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia: Aplikasi metode Analytical network process", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.6, No.2, pp.237-246.
- Rusydiana, Aam Slamet and Devi, A. (2018). "Elaborating cash waqf development in Indonesia using Analytic network process", *International Journal of Islamic Business and Economics*, Vol.2, No.1, pp.1-13.
- Rusydiana, Aam S, and Abrista Devi, (2017). "Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia: Pendekatan metode analytic network process (ANP)". *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, pp.115-133.
- Rusydiana, Aam Slamet and Devi, A. (2013). "[Challenges in Developing Baitul Maal wat Tamwiil \(BMT\) in Indonesia using Analytic Network Process \(ANP\)](#)". *Business and Management Quarterly Review* 4(2) 51-62.
- Rusydiana, Aam S, and Salman Al Parisi, (2016). "How far has our wakaf been researched?". *Etikonomi*, Vol. 15, No. 1, pp.31-42.
- Saad, N.M., Kassim, S., and Hamid, Z. (2016). "Best practices of waqf: Experiences of Malaysia and Saudi Arabia", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol.2, Issue 2, pp.57-74.

- Saaty, Thomas L. (1977). "A scaling method for priorities in hierarchical structures", *Journal of Mathematical Psychology* Vol 15, pp.234-281.
- Saaty, Thomas L. (1986). "Axiomatic foundation of the Analytic hierarchy process", *Management Science* Vol 32, pp.841-855.
- Saaty, Thomas L. (1990). "How to make a decision: The analytic hierarchy process", *European Journal of Operational Research* Vol 48, pp.9-26.
- Saaty, Thomas L. (1990). "An exposition of the AHP in reply to the paper 'remarks on the analytic hierarchy process'," *Management Science* Vol 36, pp.259-268.
- Saaty, Thomas L. (1996). *Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with The Analytic Hierarchy Process*. RWS Publication, Pittsburgh USA.
- Saaty, Thomas L. (2001). *Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process*. RWS Publication, Pittsburgh USA.
- Saaty, Thomas L. (2015). *The Neural Network Process (NNP): Generalization of the AHP and ANP to the Continuous Case of Neural Firing*. RWS Publication, Pittsburgh USA.
- Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. (1987), "Uncertainty and rank order in the analytic hierarchy process", *European Journal of Operational Research* Vol 32, pp.107-117.
- Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. (2006), *Decision Making with the Analytic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.
- Saaty, Thomas L and M.S. Ozdemir (2004), *The Encyclicon: A Dictionary of Decisions with Dependence and Feedback based on the Analytic Network Process*. RWS Publication, Pittsburgh
- Sipahi, S. and Timor, M. (2010), "The analytic hierarchy process and analytic network process: An overview of applications", *Management Decision*, Vol. 48, Issue 5, pp. 775-808.

Vargas, L.G. (1984), "Reciprocal matrices with random coefficients", *Journal of Mathematical Modeling* Vol 3, pp.69-81.

Wang, Y.M., and T.M.S. Elhag. (2006), "An approach to avoiding rank reversal in AHP", *Decision Support Systems* Vol 42, pp.1474-1480.

Wu, C.R., C.T. Lin, and P.H. Tsai. (2011), "Financial service sector performance measurement model: AHP sensitivity analysis and balanced scorecard approach", *The Service Industries Journal* Vol 31, pp.695-711.

Yoon, M.S., and Jung, H.W. (2005), "A study on the utilization of compatibility metric in the AHP: Applying to software process assessments", *Proceeding of ISAHP 2005, Honolulu Hawaii, July 8-10, 2003.*